

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN GANTING  
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR DALAM PROSES  
PENYUSUNAN APBD TAHUN 2006**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk mencapai Gelar Sarjana ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh :

**FEBRINA NABABAN**

**BP. 03193009**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2008**



## ABSTRAK

**Febrina Nababan, 03 193 009, Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Dalam Proses Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2006, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.**

Penelitian ini menggambarkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Dalam Proses Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2006. Apakah berada pada tingkat Informasi, Konsultasi, Kolaborasi, atau pada tingkat Pemberdayaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Sedangkan teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara yang mendalam dan dokumentasi yang mendukung penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan diperoleh data bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur berada pada tingkat Kolaborasi. Partisipasi masyarakat Kelurahan Ganting selain ditandai dengan kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota tetapi juga ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi dengan para stakeholder, mengubah dokumen ataupun menyetujui program, mempengaruhi isi program, ambil bagian dalam pembuatan keputusan, dan memberikan input atau masukan.

Partisipasinya masyarakat Kelurahan Ganting bukan hanya dalam hal memberikan usulan dalam pembangunan tetapi juga melalui sumbangan pemikiran melalui dialog interaktif, sumbangan material yang diberikan oleh masyarakat yang tidak dapat hadir dalam manunggal sakato, kotak saran untuk pembangunan, dan pemberdayaan kelurahan yaitu penyerahan pengelolaan kegiatan yang diberikan kepada kelurahan sehingga lurah bertindak sebagai pemimpin kegiatan pembangunan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakikat dari otonomi daerah adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan, melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping memberikan peluang dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Otonomi daerah memberi kemungkinan yang lebih besar kepada warga negara untuk memiliki akses langsung kepada pemerintah ke masyarakat, yang merangsang munculnya partisipasi yang luas dalam membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan<sup>1</sup>. Sementara itu Ryaas Rasyid mengatakan bahwa hasil yang diharapkan dari otonomi daerah ini adalah pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, mengurangi beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta menyusun program yang lebih serius dengan kebutuhan daerah<sup>2</sup>.

Otonomi daerah yang harus digalakan adalah Otonomi daerah yang mandiri, yang dapat mewadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak, dan aspirasi masyarakat. Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> Lihat Ranny,Emelia, "Mengelola Pemerintahan dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah dan Pemerintahan Nagari" dalam Saldi (Ed.), *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah* ,kerjasama Anggrek Law Firm dengan Pemda Kabupaten Pasaman, Padang, 2001, hal 1

<sup>2</sup> Rasyid, Ryaas, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal 36-37



yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, diarahkan dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang sedang terjadi. Dalam melaksanakan Otonomi daerah tersebut, daerah memiliki keleluasaan untuk menjalankan sebuah kewenangan sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerah, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri harus ada keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena sebuah kebijakan, masyarakat harus ikut di dalam menentukannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa otonomi mengamanatkan sebuah pemerintahan yang demokratis dan berakar pada kepentingan masyarakat. Apalagi masalah keterlibatan masyarakat telah menjadi isu sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu bagaimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan mekanisme yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi daerah terlihat dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah. Karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak saja di tangan kepala daerah, DPRD, dan aparat pelaksanaannya tetapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut<sup>3</sup>. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*. Rineka Cipta. Jakarta, 2002

pemerintah daerah, yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan demokratisasi, masyarakat juga semakin menyadari dan berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan di daerah. Sesuai dengan kepentingan dan potensi anggota masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD harus bertindak sebagai katalisator dan fasilitator. Salah satu peranan penting kebijaksanaan bagi pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional secara umum dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat daerah adalah kebijakan keuangan atau pun kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran merupakan ekspresi konkrit komitmen pemerintah dan parlemen kepada warganya. Kebijakan anggaran diatur dalam PP No.58/2005 dan PP No 65/2005 tentang proses penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, secara fungsional anggaran merupakan instrumen perumusan tanggung jawab negara (*obligation of state*) sebagai konsekuensi logis kontrak sosial rakyat dan Negara<sup>4</sup>. Maka di dalam penyusunan kebijaksanaan anggaran haruslah melibatkan masyarakat.

Penyusunan Anggaran yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah, Ia menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektifitas pemerintah daerah dan APBD juga merupakan instrumen dalam rangka

---

<sup>4</sup> Harian pagi Padang Ekspres, Padang, 25 Januari 2005, hal 3



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD terdapat beberapa tingkatan didalamnya yang dimulai dari tingkat Informasi, Konsultasi, Kolaborasi, dan Pemberdayaan bersama. Akan tetapi dari hasil penelitian partisipasi masyarakat ditingkat pemberdayaan bersama tidak ditemukan pada tingkat musrenbang kelurahan, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kota. Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena ini menyangkut kepada tercalisasinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri yang nantinya akan tertampung dalam APBD.

Partisipasi Masyarakat pada tingkat informasi ditandai dengan hadirnya masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota. Sebelum masyarakat menghadiri setiap Musrenbang tersebut tentunya masyarakat mendapatkan atau mengetahui informasi, baik itu informasi mengenai jadwal pelaksanaan Musrenbang maupun informasi mengenai program-program apa saja yang akan diajukan, ini menandakan bahwa masyarakat aktif dalam mencari informasi apalagi informasi tersebut menyangkut kepada kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada tingkat Konsultasi ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi dengan stakeholder (Pemangku Kepentingan), mengubah dokumen atau menyetujui program kegiatan dan ikut berdiskusi secara aktif. Dengan antusias masyarakat kelurahan Ganting yang tinggi dalam menghadiri Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan, Musrenbang Kota dalam mempertahankan usulan dari kelurahan Ganting, sehingga masyarakat aktif dalam mengadakan diskusi didalam setiap musrenbang berlangsung dengan cara mempertahankan argumen dan meyakinkan bahwa usulan yang masyarakat kelurahan ganting ini usulan yang merupakan kebutuhan dan bukanya keinginan. Di Musrenbang kota perwakilan masyarakat ganting tidak bisa berbuat banyak karena usulan yang dari Dinas disatukan dengan usulan RKPD kota sehingga masyarakat berpartisipasi hanya dalam menyetujui dokumen.

Partisipasi masyarakat pada tingkat Kolaborasi ditandai dengan memberikan input atau masukan, ambil bagian dalam pengambilan keputusan, dan mempengaruhi isi program pada setiap Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan, Forum SKPD. Pada forum SKPD Masyarakat kelurahan ganting telah memberikan masukan dan sempat terjadi selisih pendapat antara masyarakat dengan kepala dinas. Dengan berpartisipasinya masyarakat kelurahan ganting dalam memberikan masukan-masukan kepada Kepala dan staf dinas. Dari penelitian yang dilakukan partisipasi masyarakat Kelurahan Ganting berada pada tingkat Kolaborasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku Teori

- Alfan miko, dkk. Ilmu social, Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya. Dalam 70 tahun Prof. Abdul Azis MA, Ph.D Universitas Andalas pers, 2005.
- Britha Mikkelesen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- David C Korten, *Menuju Abad 21, Tindakan sukarela dan agenda global*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Kaho, Josef Riwu., 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasmita. 1996. *Pembangunan Untuk rakyat*. CIDES. Jakarta
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta
- Rasyid, Ryass, dkk., 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta
- Tjokroadmidjojo, Bintoro., 1991, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

### Buku-Buku Metodologi

- Lexy J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardalis, 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prof.Dr.Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005